

ABSTRAK

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat, maka PNS di seluruh Indonesia harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PNS di Kabupaten Kendal. Bagi PNS yang melakukan pelanggaran dan diduga melakukan perbuatan pidana, maka akan diproses secara hukum. Penegakan hukum dalam bagi PNS yang melakukan perbuatan pidana membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitiannya bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Urgensi koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, yakni : (a) mengetahui status hukum CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diduga tersangkut masalah hukum pidana, (b) tidak ada tumpang tindih kepentingan dan dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan, serta (c) sebagai upaya penegakan hukum dalam bidang ketertiban dan ketentraman; (2) Koordinasi antar penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, yakni : (a) pemerintah Kabupaten Kendal membuat surat kepada (Kepolisian/Kejaksaan) perihal konfirmasi status/kedudukan CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, (b) ditindak lanjuti dengan surat jawaban perihal status/kedudukan CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, (c) kepolisian memberikan ruang mediasi (d) kejaksaan menyampaikan kualifikasi pidana yang dilakukan oleh oknum PNS dan menyampaikan sanksi pidananya, serta (e) lingkungan Pengadilan Negeri Kendal mengadili sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Hambatan di dalam melakukan koordinasi antar penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap PNS yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan, antara lain : (a) tidak berjalannya musyawarah atau mediasi, (b) PNS berlindung dan masih berkerabat dengan orang yang mempunyai kewenangan di Pemerintah Daerah, dan (c) kualifikasi tindak pidananya berat sehingga berakibat kepada pemecatan/pemberhentian sebagai PNS. Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : (a) membuat MoU, (b) diselesaikan secara kekeluargaan, serta (c) melakukan penanganan perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di dalam melaksanakan penanganan perkara.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, dan Perbuatan Pidana*

ABSTRACT

In carrying out its duties as a public servant, civil servants throughout Indonesia must comply with applicable laws and regulations, including civil servants in Kendal District. For civil servants who committed violations and allegedly committed criminal acts, it will be processed by law. Law enforcement within civil servants who commit crimes requires coordination between local government and law enforcement officials.

This research uses sociological juridical method. The research specification is descriptive analysis. The data used are primary and secondary data, obtained through interview and literature study, which then analyzed qualitatively.

The results of the research indicate that : (1) Urgency of coordination between law enforcement and Kendal District Government if there is a civil servant which is being carried out law enforcement action due to crime which he did, namely : (a) to know the legal status of civil servant/civil servant in Kendal District Government suspected to be involved in criminal law problem; (b) no overlap of interests and in its implementation there are no obstacles, and (c) as law enforcement efforts in the area of order and tranquility; (2) Coordination between law enforcers with Kendal District Government if there are civil servants who are doing law enforcement actions due to criminal acts committed, namely : (a) Kendal District Government to make a letter to (police/prosecutor) regarding the confirmation status/position candidates for civil servants (CPNS)/PNS, (b) followed up with an answer letter regarding the status/position of CPNS/PNS in Kendal District Government, (c) the police provide a mediation room, (d) the prosecutor's office submits criminal qualifications conducted by civil servants and conveyed by the civil servants, and penal sanctions, and (e) the Kendal District Court adjudates in accordance with applicable laws and regulations; (3) Obstacles in coordinating between law enforcers with Kendal District Government against civil servants who are being carried out law enforcement actions due to criminal acts committed, among others : (a) the failure of deliberation or mediation, (b) civil servants take refuge and are still related to persons who have authority in the local government, and (c) their serious criminal qualifications resulting in dismissal/termination as civil servants. While the solutions to overcome these obstacles are : (a) making the MoU, (b) settled amicably, and (c) handling cases according to the laws and regulations applicable in the handling of cases.

Keywords : *Law Enforcement, Civil Servants, and Criminal Acts*